

## Formasi 77 Jet Tempur Terbang di Atas Istana Saat Peringatan HUT Ke-77 RI

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma Indan Gilang Buldiansyah mengatakan, 16 pesawat tempur F-16 bakal membentuk formasi 77 di atas Istana Negara saat peringatan HUT ke-77 RI, Rabu (17/8).

Menurutnya, formasi 77 yang dibentuk tim Garuda Flight itu melambangkan tahun kemerdekaan RI.

"Kami dipercaya kembali untuk melaksanakan demo udara dalam bentuk, yang pertama, adalah 16 pesawat F-16 membentuk angka 77 melintas di atas Istana Negara," ucap Indan setelah geladi bersih demo udara peringatan HUT ke-77 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (15/8).

Selain membentuk formasi 77, salah satu dari 8 helikopter yang tergabung dalam tim Nusantara Flight akan membawa bendera Merah Putih raksasa seberat 1,3 ton berukuran 20x30 meter. Bendera raksasa itu juga akan melintas di atas

Istana Negara.

"Jadi kita siapkan ada 8 helikopter, masing-masing flight itu ada 2 elemen. Helikopter ini adalah gabungan dari beberapa skadron," ucap Indan.

Dia menjelaskan, rute terbang F-16 pada tanggal 17 Agustus mendatang adalah dari selatan ke utara. Sementara helikopter melintas dari arah timur ke barat. Kegiatan latihan ini, kata Indan, sudah dipersiapkan sejak beberapa minggu sebelumnya.

Pesawat tempur F-16 sendiri didatangkan dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

"Jadi latihan yang pertama adalah di hari Sabtu geladi kotor I. Geladi kotor II dilaksanakan Minggu dan hari ini kita selesaikan geladi bersih untuk pelaksanaan demo udara yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022," ucapnya.

● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## PELUNCURAN KAPAL BANTU RUMAH SAKIT TNI AL

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) didampingi Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod (kiri) dan Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut (Kadisadal) Laksamana Pertama TNI Maman Rohman (kanan) meresmikan peluncuran kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/8). Kapal buatan PT PAL Indonesia yang merupakan pesanan TNI Angkatan Laut itu akan disisgakan di Koarmada I menggantikan kapal BRS Semarang.

## Komnas HAM Dalam Dugaan Obstruction of Justice di Lokasi Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM kumpulkan sejumlah bukti dari Dokkes, Cyber dan hasil dari Uji Balistik. Hal ini untuk memperkuat memang ada pelanggaran obstruction of justice.

JAKARTA (IM) - Komnas HAM akan meninjau tempat kejadian perkara terjadinya penembakan yang menewaskan Brigadir J di Rumah Dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

Olah TKP sendiri nantinya akan melibatkan beberapa pihak terkait seperti tim Inafis, Dokkes untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran tindak pidana dalam peristiwa tersebut atau tidak.

"Karena ini banyak perubahan terus kita juga pengen ngeliat langsung situasi disana seperti apa kan salah satu isu yang di kami itu adanya obstruction of justice apakah ditempat itu ada obstruction of justice untuk menguji itu," ujar Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (15/8).

Selain itu juga pihaknya

telah mengumpulkan beberapa alat bukti tambahan dari Dokkes, Cyber dan hasil dari Uji Balistik untuk memperkuat terkait adanya pelanggaran obstruction of justice.

"Nah kami pengen lihat salah satu point penting apakah terjadi obstruction of justice di TKP," jelasnya.

Komis Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin (15/8) sore melakukan peninjauan ke tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J, di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta. Rumah tersebut juga disebut sebagai rumah dinas eks Kadiv Propam Polri yang juga menjadi tersangka pada kasus ini yaitu, Irijen Ferdy Sambo.

Adapun peninjauan TKP dilakukan guna merampungkan seluruh proses yang diperlukan Komnas HAM. Agenda peninjauan yang awalnya akan berlangsung pada Senin (15/8) pukul 10.30 akan berubah menjadi pukul 15.00 WIB.

"Komnas HAM RI menyampaikan perubahan jadwal peninjauan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kompleks Polri Duren Tiga yang semula

pada Senin, 15 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB menjadi Senin, 15 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB," ucap Tim Komnas HAM dalam keterangan resminya, Sabtu (14/8).

Nantinya, peninjauan terhadap TKP ini diharapkan dapat membuat kebenaran peristiwa terungkap. "Peninjauan langsung ke lokasi peristiwa diharapkan semakin membuat terangnya peristiwa," imbuh surat tersebut. ● mei

## Demokrat Bangun Koalisi Setelah Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Anggota Majelis Tinggi Pemokrat, Syarif Hasan mengungkapkan, partainya akan fokus membangun koalisi setelah pengumuman penetapan peserta Pemilu 2024, Desember mendatang.

Hal itu dikarenakan Demokrat kini masih fokus pada tahapan verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu.

"Setelah Desember ditetapkan, baru kita, mudah-mudahan kita mulai mengerucut," kata Syarif ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/8).

Ia mengatakan, sejauh ini Demokrat sudah membangun komunikasi dengan sejumlah partai, di antaranya Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, diakui Syarif, Demokrat tak berhenti berkomunikasi dengan partai

lainnya.

"Pokoknya kita komunikasi kepada semuanya. Memang yang beredar itu oleh wartawan itu Nasdem dengan PKS," ujarnya.

Syarief melanjutkan, Demokrat juga tidak menutup kemungkinan komunikasi dengan koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dia tidak ingin memastikan apakah komunikasi itu akan berbuah merapatnya Demokrat ke koalisi tersebut.

"Ya belum dong. Kita lihat saja nanti, belum tentu. Kita harus finalkan. Ya sabar dulu lah. Enggak akan buru-buru," tutur anggota Komisi I DPRD itu.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan, hingga kini belum memutuskan untuk bergabung ke dalam salah satu koalisi maupun membentuk koalisi sendiri guna menghadapi, Pemilu 2024. ● mar

## Surya Darmadi, Buronan Kasus Korupsi Rp78 Triliun Tiba di Gedung Kejaksaan Agung

JAKARTA (IM) - Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, tiba di Kompleks Kejaksaan Agung, Senin (15/8). Tak ada satu patah kata pun yang terucap dari buronan kelas kakap tersebut.

Berdasarkan pantauan wartawan di Kompleks Keagungan, Surya Darmadi tiba di kompleks Kejaksaan Agung, Jalan Singamanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.58 WIB. Suryadi tiba menggunakan kemeja putih dikawal sejumlah petugas menuju gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Surya merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas penguasaan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dia sudah empat kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung.

Kabar kepulangan Surya kali pertama dilontarkan oleh kuasa hukumnya, Juniver Girsang. Juniver menyebut Surya akan langsung mendatangi tim penyidik untuk menjelaskan seluruh dugaan

tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Juniver juga menjelaskan alasan klienyanya tak menghadiri panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.

Dia mengatakan, Surya Darmadi yang sudah lansia dan tengah menjalani pengobatan di luar negeri hingga saat ini. Karena proses hukum ini, Surya Darmadi berupaya untuk mempercepat proses perobatannya.

Kejagung memperkirakan kerugian negara atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan sampai Rp78 Triliun.

Dia menjelaskan konstruksi kasus, diawali pada 2003, SD melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.

Sebagai informasi, Surya merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas penguasaan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kabar kepulangan Surya

kali pertama dilontarkan oleh kuasa hukumnya, Juniver Girsang. Juniver menyebut Surya akan langsung mendatangi tim penyidik untuk menjelaskan seluruh dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Juniver juga menjelaskan alasan klienyanya tak menghadiri panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.

Dia mengatakan Surya Darmadi yang sudah lansia dan tengah menjalani pengobatan di luar negeri hingga saat ini. Karena proses hukum ini, Surya Darmadi berupaya untuk mempercepat proses perobatannya.

Kejagung memperkirakan kerugian negara atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan sampai Rp78 Triliun.

Kejagung menjelaskan konstruksi kasus, diawali pada 2003, SD melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit. ● han



FOTO: ANT

## IKRAR SETIA NKRI MANTAN ANGGOTA KHILAFATUL MUSLIMIN

Salah satu mantan anggota Khilafatul Muslimin (KM) mencium bendera Merah Putih saat melakukan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila serta melepas baiat (janji taat) kepada Amir Khilafatul Muslimin di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Lampung, Senin (15/8). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Lampung diikuti 51 mantan anggota dan simpatisan Khilafatul Muslimin (KM) dari berbagai daerah di Lampung.

## Mantan Anggota DPRD Jabar Ade Barkah ke Lapas Sukamiskin

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Ade Barkah Surahman ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Sukamiskin, Bandung) "Jaksa eksekutor telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung yang berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana Ade Barkah Surahman ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (15/8).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, Ade Barkah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ade Barkah terbukti menerima suap terkait bantuan dana dari Pemprov (Banprov) untuk Pemkab Indramayu.

Atas perbuatannya, Ade divonis empat tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan pada saat proses penyidikan. Ade juga diganjar untuk membayar pidana denda Rp100 juta subsidi tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp750 juta.

Tak hanya itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Ade Barkah berupa pencabutan hak untuk dipilih jabatan publik maupun pejabat negara selama dua tahun lebih lama dari pidana pokoknya. ● mar

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Keputusan Sirkuler PT. GIRI ARTA KUSUMA berkedudukan di Jakarta Timur, tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan membubarkan Perseroan serta menunjuk Tuan ARIO PUTRA selaku LIKUIDATOR Perseroan  
Segala keberatan dan sanggahan atas pembubaran Perseroan dapat diajukan kepada Kementerian HUKUM Dan HAM RI, Jl. HR. Rasuna Said Jav 6-7 Jakarta Selatan dalam jangka waktu 50 hari terhitung sejak tanggal Pengumuman ini.  
Jakarta, 16 Agustus 2022  
Likuidator  
ARIO PUTRA



FOTO: ANT

**PENJAGAAN PENGELEDAHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
Petugas KPK memeriksa pegawai saat pengeledahan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Pemalang, Jawa Tengah, Senin (15/8). KPK melakukan pengeledahan sebagian kantor di Kabupaten Pemalang terkait penetapan tersangka Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, tiga kepala dinas, satu pj Sekda Pemalang dan satu pihak swasta.

## Geledah 2 Lokasi di Jaksel, KPK Sita Dokumen Suap Bupati Pemalang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah dua lokasi di daerah Jakarta Selatan (Jaksel) pada Sabtu (13/8). Lokasi yang digeledah rumah tinggal dan kantor yang diduga berkaitan dengan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW).

"Tim penyidik, telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Senin (15/8).

KPK berhasil menemukan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus suap Mukti Agung Wibowo. Saat ini, KPK masih melakukan analisis terhadap sejumlah dokumen dan barang elektronik tersebut dalam rangka proses penyitaan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan barang elektronik. Analisis disertai penyitaan segera dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas perkara dari para tersangka," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Keenam tersangka tersebut yakni, Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW).

Kemudian, Komisaris PT Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo (AJW); Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Slamet Masduki (SM); Kepala BPBD Pemalang, Sugiyanto (SG); Kadis Kominfo Pemalang, Yanuaris Nitbani (YN); serta Kadis PU Pemalang, M Saleh (MS).

Dalam perkara ini, Mukti diduga menerima uang suap sekira Rp4 miliar melalui orang kepercayaan, Adi Jumal Widodo. Uang tersebut diduga berasal dari sejumlah aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pemalang dan pihak lain terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama (JPTP).

Adapun, sejumlah ASN yang memberikan suap untuk mendapatkan jabatan di Pemalang tersebut yakni, Slamet Masduki; Sugiyanto; Yanuaris Nitbani; serta M Saleh. Uang suap dikumpulkan melalui Adi Jumal.

Di mana, besaran uang yang dipatok untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp60 juta hingga Rp350 juta.

Tak hanya itu, Mukti diduga juga telah menerima uang dari pihak swasta sebesar Rp2,1 miliar yang bertentangan dengan jabatannya. KPK masih mendalami uang sebesar Rp2,1 miliar yang diterima Mukti tersebut. ● han